

**IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG  
FASILITASI PENGEMBANGAN UMKM DI  
KABUPATEN PALI TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara**



**Oleh :**

**Rian Heruansa**

**NIM. 07011381419148**

**Konsentrasi Kebijakan Publik**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
DESEMBER 2018**

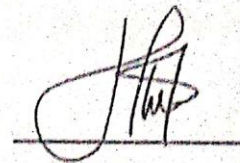
## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pengembangan UMKM di Kabupaten PALI Tahun 2017" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 4 Desember 2018.

Palembang, 4 Desember 2018

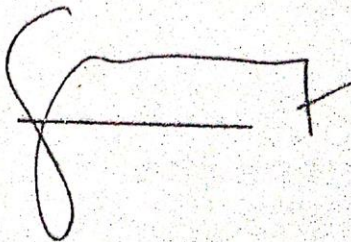
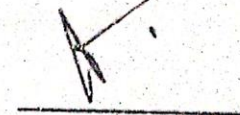
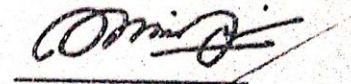
Ketua :

1. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd  
NIP. 197803022002122002



Anggota :

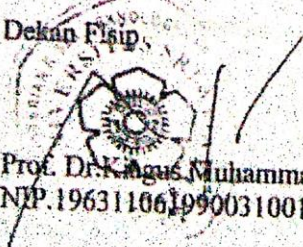
2. Ziilani Surya Marpaung, S.sos., MPA  
NIP. 198108272009121002
3. Dr. Andrias Lionardo, S.IP., M.Si  
NIP.197905122002121003
4. Drs. Gatot Budiarto, MS  
NIP.195806091984031002



Mengetahui :

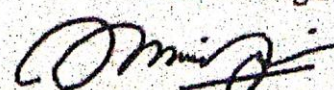
Dekan Fisip,

Prof. Dr. Agus Muhammad Sobri.M.Si  
NIP.196311061990031001



Ketua Jurusan Administrasi Negara

Zailani Surya Marpaung, S.sos., MPA  
NIP. 198108272009121002



**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN PEMERINTAH**  
**NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG FASILITASI**  
**PENGEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN PALI**  
**TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1**  
**Ilmu Administrasi Negara**

Oleh:

**RIAN HERUANSA**  
**07011381419148**

Telah disetujui oleh Pembimbing, Oktober 2018

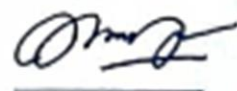
**Pembimbing I**

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd  
NIP.197803022002122002



**Pembimbing II**

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP.198108272009121002



## MOTTO

*“Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah!”*

*(Behold, all affairs tend towards Allah!)*

**(QS. Asy-Syura: 53)**

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya.”*

*(On no soul doth Allah Place a burden greater than it can bear.)*

**(QS. Al-Baqarah: 286)**

*“Apa pun yang telah Allah titipkan pada diri kita, ikhlaskan.*

*Bersyukur karena setiap kita bisa menjadi istimewa dengan caranya masing-masing”*

**(Fitri Maharani)**

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini didedikasikan spesial untuk :*

- *Orang tua tercinta (Bapak Sunarman, Lilis Suryani serta Neneng Putu Ningsih)*
- *Adik kandung (Rani Aprilia da Refin Pramuja)*
- *Almamater kabanggaanku*

## **ABSTRACT**

This research is entitled "Implementation of Article 4 of Government Regulation Number 17 of 2013 About Facilitation of MSME Development in PALI District in 2017 ". The background this research specifically the implementation of Article 4 of Government Regulation Number 17 of 2013 concerning Facilitation of MSME in the field of resources humans Regency Head of District. The purpose of this study is to find out Implementation of Article 4 of Government Regulation Number 17 of 2013 concerning Development Facilitation MSMEs in PALI Regency in 2017. This type of research is descriptive research using qualitative research methods. The type of data used is the primary data type and secondary data. While the technique of data collection is done through observation, interviews depth, and documentation. This research uses Charles O. Jones theory which consists of organization implementing policies, interpretations, and applications or implementing policies. The research findings show that the stages of the organizational structure, organizational structure that has not running effectively, overlapping tasks between employees, and the budget that has not fully realized. At the stage of interpretation, there are still entrepreneurs who do not understand about material delivered during training, lack of intensity and time needed on during training and the absence of regulations that certainly govern entrepreneurship training activities. At the stage of the policy application, entrepreneurs do not know about training matters carried out at the Office of Cooperatives and SMEs, this is due to the lack of access to good information in print, online media, or social media. Based on these findings, the solution is at the stage organizational structure, there needs to be a comprehensive review of which structures important for the Office of Cooperatives and SMEs and definite division of tasks. Solution to the stage of interpretation, official service meetings with employers are carried out more intensely and necessary there are clear rules and regulations when implementing policies and time and meetings with entrepreneurs more intense. Finally at the application stage, the cooperative and SME services need to be working with the media so that the information available to the public.

***Keywords : in the UMKM Development Facility in PALI District***

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Pengembangan UMKM di Kabupaten PALI Tahun 2017”. Yang melatarbelakangi penelitian ini khususnya Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Pengembangan UMKM dalam bidang sumber daya manusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pengembangan UMKM di Kabupaten PALI Tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori *Charles O.Jones* yang terdiri dari organisasi pelaksana kebijakan, interpretasi, dan aplikasi atau penerapan pelaksana kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tahapan struktur organisasi, Struktur organisasi yang belum berjalan dengan efektif, terjadinya tumpang tindih tugas antar pegawai, dan anggaran yang belum terealisasi penuh. Pada tahapan interpretasi, masih ada pengusaha yang tidak paham mengenai materi yang disampaikan pada saat pelatihan, kurangnya intensitas dan waktu yang dibutuhkan pada saat pelatihan dan tidak adanya peraturan yang pasti mengatur kegiatan pelatihan kewirausahaan. Pada tahapan aplikasi kebijakan, para pengusaha tidak mengetahui hal terkait pelatihan yang dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM, hal ini disebabkan karena minimnya akses informasi baik itu di media cetak, media online, atau media sosial. Berdasarkan temuan ini, maka solusi pada tahap struktur organisasi, perlu ada peninjauan ulang secara menyeluruh mengenai struktur mana saja yang penting bagi dinas Koperasi dan UKM dan dilakukannya pembagian tugas secara pasti. Solusi pada tahapan interpretasi, pertemuan pihak dinas dengan pengusaha dilakukan lebih intens lagi dan perlu adanya ketetapan peraturan yang jelas pada saat pelaksanaan kebijakan serta waktu dan pertemuan dengan pengusaha lebih intens lagi. Terakhir pada tahapan aplikasi, dinas koperasi dan UKM perlu bekerja sama dengan pihak media agar informasi yang ada dapat diketahui oleh masyarakat.

**Kata Kunci : Fasilitasi Pengembangan UMKM Di Kabupaten PALI**

## KATA PENGANTAR

Pertama, penulis ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat keridhoan-Nya, penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul, "Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pendetensian Deteni Tahap Perawatan oleh Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Tahun 2017 di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang." Skripsi ini dibuat oleh penulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menempuh derajat S-1 Ilmu Administrasi Negara.

Selama mengerjakan proses skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta, Bpk. Sunarman dan Ibu Lilis Suryani(alm) serta ibu Neneng Putu Ningsih adik-adik kesayangan Rani Aprilia dan Repin Pramuja yang senantiasa memberikan dukungan, berupa materiil, moril, dan doa yang luar biasa.
2. Prof. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu selama proses kuliah.
4. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah bekerja ikhlas untuk memudahkan urusan administrasi penulis dalam skripsi.
5. Ermanovida, S.Sos.,M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negarayang telah bekerja ikhlas untuk memberikan pelayanan akademik yang baik.
6. Dwi Mirani, S.IP., M.SI selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bekerja ikhlas untuk mengarahkan penulis selama perencanaan studi.
7. Hoirun Nisyak, S.PD.,M.PD selaku Dosen Pembimbing I dan Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah ikhlas dan sabar untuk mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaganya dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah mengajar dan mendidik penulis.
9. Ibu Asna Aryani Selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro serta seluruh jajarannya yang telah berkenan

mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memudahkan dalam memperoleh data.

10. Seluruh rekan-rekan seperjuangan (Administrasi Negara Genap dan Ganjil Angkatan 2014) yang penulis sayangi yang telah berjuang bersama dan saling mendukung satu sama lain.
11. Seluruh pihak yang telah terlibat dalam membantu kelancaran kegiatan penyusunan skripsi penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Palembang, Desember 2018  
Penulis,

Rian Heruansa  
NIM. 07011381419148



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRACT .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
BAB I .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
BAB II .....	12
TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Landasan Teori .....	12
1. Kebijakan Publik .....	12
2. Implementasi Kebijakan .....	14
B. Pengertian Fasilitas .....	18
C. Model-Model Implementasi Kebijakan .....	18
D. Teori yang digunakan dalam penelitian .....	24
E. Penelitian Terdahulu .....	27
BAB III .....	32
METODE PENELITIAN .....	32
A. Desain Penelitian .....	32
B. Definisi Konsep .....	32
C. Fokus Penelitian .....	33
D. Unit Analisis .....	34
E. Informan Penelitian .....	35
F. Jenis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G. Sumber Data .....	35
H. Teknik Pengumpulan Data .....	36

I. Teknik Keabsahan Data.....	38
J. Teknik Analisis Data .....	39
BAB IV .....	42
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
1. Sejarah Singkat Kabupaten PALI.....	42
2. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten PALI.....	45
3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten PALI .....	48
4. Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten PALI .....	50
B. Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pengembangan UMKM di Kabupaten PALI Tahun 2017 .....	56
1. Organisasi Pelaksana Kebijakan .....	56
a. Struktur Organisasi .....	56
b. Keahlian Pelaksana.....	63
2. Interpretasi Para Pelaksana Kebijakan .....	72
a. Sesuai Dengan Peraturan .....	72
b. Sesuai Dengan Petunjuk Pelaksana .....	76
3. Aplikasi atau Penerapan oleh Para Pelaksana Kebijakan .....	81
a. Penyediaan Fasilitas Layanan .....	81
b. Kegiatan Administrasi .....	85
BAB V .....	91
KESIMPULAN DAN SARAN .....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSATAKA .....	93

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 1 : Kriteria UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
- Tabel 2 : Daftar UMKM Perjenis Usaha di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir  
(PALI)
- Tabel 3 : Rekapitulasi Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Penukal Abab  
Lematang Ilir Tahun 2017
- Tabel 4 : Data UMKM Perkecamatan Kabupaten PALI (PALI)  
Tahun 2017
- Tabel 5 : Fokus Penelitian
- Tabel 6 : Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten PALI
- Tabel 7 : Temuan di Lapangan mengenai struktur organisasi di Dinas Koperasi dan UKM
- Tabel 8 : Jumlah Pegawai PNS dan Honor di Dinas Koperasi dan UKM
- Tabel 9 : Temuan dilapangan terhadap keahlian pelaksana Dinas Koperasi dan UKM
- Tabel 10 : temuan dilapangan mengenai anggaran di Dinas Koperasi dan UKM
- Tabel 11 : temuan dilapangan terhadap pelaksana yang sesuai aturan
- Tabel 12 : temuan lapangan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksana
- Tabel 13 : temuan dilapangan dalam upaya pelayana UMKM
- Tabel 14 : Temuan dilapangan dalam kegiatan administrasi
- Tabel 15 : Matriks Wawancarara

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

Gambar 2 : Peta Lokasi Kabupaten PALI

Gambar 3 : Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten PALI

Gambar 4 : Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten PALI

Gambar 5 : Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten PALI

Gambar 6 : Peraturan Bupati PALI Nomor 051 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas  
Pokok dan Fungsi Koperasi dan UKM

Gambar 7 : Struktur pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten PALI

Gambar 8 : Penyelenggaraan latihan kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM

Gambar 9 : Penyelenggaraan latihan kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM

Gambar 10 : pelayanan administrasi Dinas Koperasi dan Usha Kecil dan Menengah

## DAFTAR SINGKATAN

Penukal Abab Lematang Ilir	(PALI)
Kamar Dagang dan Industri	(KADIN)
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	(UMKM)
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	(DisKop UKM)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	(LPPD)
Surat Izin Tempat Usaha	(SITU)
Tanda Daftar Perusahaan	(TDP)
Izin Usaha Industri	(IUI)
Surat Izin Usaha Perdagangan	(SIUP)
Kartu Tanda Penduduk	(KTP)
Kartu Keluarga	(KK)
Dinas Sosial	(DinSos)
Satuan Polisi Pamong Praja	(Satpol PP)

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### Lampiran

1. Surat Tugas
2. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Iilir Nomor 051 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir
3. Surat Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Iilir Nomor 129/kpts/dinkop.ukm/2017 Tentang Panitia Pelaksana dan Peserta Pelatihan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan banyak hal baik itu dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam, namun sejak pertengahan Tahun 1997 krisis ekonomi yang menimpa bangsa Indonesia hingga kini masih dirasakan dampaknya baik itu dari sisi negatif maupun positif. Dampak negatif krisis ekonomi itu antara lain pertumbuhan ekonomi yang semakin merendah, perusahaan banyak mengalami kebangkrutan, dan dampak krisis yang menyebabkan masyarakat menjadi miskin. Sedangkan dampak positifnya yaitu berupa mengingatkan dan menyadarkan pemerintah akan perlunya perubahan paradigma pembangunan yang selama ini menggunakan pendekatan-pendekatan yang berlandaskan ekonomi konglomerat untuk dikembalikan ke ekonomi kerakyatan. Tentu saja hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk masa yang akan datang bahkan setiap Tahun anggaran selalu digelontarkan pemerintah untuk membangun perokonomian masyarakat Indonesia.

Dalam merealisasikan tujuan pembangunan maka segenap potensi harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia yang mesti dikembangkan baik itu dari segi pengetahuan maupun keterampilan sehingga mampu menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat terealisasikan. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan tersebut maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta masyarakat harus saling bekerjasama sebagai pelaku utama pembangunan. Sedangkan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memiliki peran yang lebih

penting yaitu berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan usaha-usaha masyarakat yang telah ada tersebut. Namun pada hakikatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercantum di dalam pembukaan UUD 1995 dinyatakan bahwa tujuan dari pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dikemukakan oleh staf bagian keuangan di sekretariat dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah mengenai tujuan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yaitu:

“ Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) di kabupaten PALI setiap Tahun terus mengalami peningkatan baik dalam jumlah pengusaha maupun produknya, selain itu UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) “

Tabel 1 : Kriteria UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omset
1.	Usaha Mikro	Maks 50 juta	Maks 300 juta
2.	Usaha Kecil	>50 juta-500 juta	>300 juta - 2,5 milyar
3.	Usaha Menengah	>500 juta-1 milyar	>2,5 milyar-50 milyar

*Sumber : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di peroleh pengertian bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang



berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan Tahunan.

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) masih dianggap belum mampu meningkatkan daya saing ekonomi di tingkat nasional terutamanya di regional ASEAN hal ini disebabkan karena kurangnya permodalan serta sarana dan prasarana dalam menyebarkan produk-produk yang telah ada. Jika pengusaha memiliki modal yang cukup maka usaha yang ada dapat dikembangkan. Selain itu usaha kecil dan mikro merupakan usaha perorangan dan mengandalkan modal dari pemilik yang jumlahnya terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau modal lainnya sulit diperoleh. Maka dari itu dalam praktek Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sering kali berada di posisi yang lemah. Pemerintah mulai berusaha memperbaiki situasi ini secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat.

Pembentukan dan peran serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) baik di tingkat pusat maupun daerah dalam membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) juga merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat meningkatkan kinerja dan daya saing. Sejalan dengan otonomi daerah, pembangunan UMKM merupakan salah satu peran pemerintah agar dapat melatih dan mengembangkan setiap usaha-usaha masyarakat yang ada serta menjadi sarana bagi masyarakat dalam memasarkan produk-produk yang ada dan berikut jenis-jenis usaha yang ada di kabupaten PALI :

Tabel 2 : Daftar UMKM Perjenis Usaha di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Batu Bara	107
2.	Salon	61
3.	Penjahit	73
4.	Bengkel	295
5.	Air Isi Ulang	72
6.	Meuble	62
7.	Ernak Ikan	89
8.	Ternak Kambing	154
9.	Ternak Bebek	68
10.	Ternak Ayam	13
11.	Ternak Sapi	12
12.	Kerajinan Kaleng	52
13.	Dagang Manisan	498
14.	Tahu	23
15.	Rumah Makan	137
16.	Aneka Manisan	246
17.	Kelontongan	8
18.	Kopi	25
19.	Kerupuk	107
20.	ATK	25
21.	Limbah Bekas	28
22.	Roti	21
23.	Sayur-Sayuran	47
24.	Optik	2
25.	Gula Aren	10
26.	Kerajinan Tangan	52
27.	Cucian Mobil/ Motor	11
28.	Sparepat	14
29.	Fashion / Pakaian	42
30.	Jual Beli Karet	6
31.	Material	11
32.	Kerajinan Anyaman	283
33.	Tempe	112
34.	Kripik	97
35.	Gas / BBM	43
36.	Internet	24
37.	Limbah Bekas	28
38.	Les / SMP YKPP Pendopo	1
39.	Pahlawan MIPA Praktek	1

	Total	2.945
--	-------	-------

Sumber: Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten PALI (PALI)

Apabila dilihat pada tabel 2 maka usaha masyarakat yang ada di Kabupaten PALI lebih banyak condong ke arah pedagang manisan yang berjumlah 498 pedagang yang tersebar di setiap kecamatan selanjutnya usaha kedua yang lebih banyak diminati yaitu usaha bengkel dengan jumlah 295 dan yang ketiga yaitu kerajinan anyaman dengan jumlah 283 pengerajin anyaman. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, UMKM memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi negara dan daerah. Berikut usaha yang dilakukan pemerintah kabupaten PALI dalam rangka meningkatkan produktivitas yang ada agar lebih diminati oleh masyarakat luas, yaitu :

Tabel 3 : Rekapitulasi Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Penulal Abab Lematang Ilir Tahun 2017

No	Uraian Kegiatan	Dana	Anggota	Keterangan
1.	Pelatihan Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktek persiapan dodol tape ubi</li> <li>• Praktek persiapan permen tape ubi</li> </ul>	21.000.000	30 Orang	Pemberian pelatihan terhadap pengusaha dodol
2.	Pameran Peralatan	4.500.000	6 orang	Pemasaran produk-produk yang ada di PALI
3.	Promosi HUT PALI		32 orang	Pameran produk ukm yang ada di PALI

Sumber: Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten PALI (PALI)

Pemerintah Kabupaten PALI disini berusaha menciptakan produk-produk yang ada agar dapat menjadi penghasilan bagi Kabupaten PALI, salah satunya dengan menciptakan berbagai produk seperti dodol tape ubi seperti yang tercantum di tabel 3. Selain itu pemerintah daerah beserta Dinas Koperasi dan UKM juga harus memfokuskan

pengembangan produk UMKM-nya dengan cara menciptakan kerajinan tangan seperti *Ambung* kerajinan yang terbuat dari rotan dan biasanya digunakan untuk berkebun, lalu ada *Bakul* pesegi empat bertutup, *Caping* anyaman bambu yang berbentuk topi, dan kerajinan tangan lainnya.

Dengan adanya produk yang akan di unggulkan maka pemerintah juga harus memiliki sumber daya yang dapat mengelolanya dengan baik agar produk yang dihasilkan menjadi berkualitas, untuk sekarang jumlah sumber daya yang menerima pelatihan dodol tape ubi berjumlah 30 orang yang terdiri dari 13 laki-laki dan 17 perempuan. Pelatihan yang diberikan oleh pihak dinas sebagai fasilitator dalam pengembangan usaha biasanya dalam hal sosialisasi dan pengarahan di dalam pembuatan dodol tape ubi. Disini Dinas Koperasi dan UKM tidak membantu dalam bentuk dana melainkan dalam bentuk barang. Namun para pengusaha UMKM dengan berbagai keterbatasannya perlu difasilitasi, digerakan dan dimotivasi sehingga semakin berkembang naluri kewirausahaannya dengan upaya-upaya terpadu dan terencana seperti pelatihan kewirausahaan terhadap para pengusaha dan sosialisasi mengenai produk yang akan dibuat. Pada Tahun 2017 anggaran yang dilontarkan dari pusat kepada Dinas Koperasi dan UKM sebanyak 2,8 milyar, seharusnya dengan dana sebanyak itu dinas koperasi dan UKM dapat memanfaatkannya dalam pengembangan UMKM. Apalagi kalau hanya untuk pelatihan kewirausahaan seharusnya dapat dilakukan sebanyak mungkin agar masyarakat dapat memahami sepenuhnya. Hal ini diharapkan agar pengetahuan terhadap produk yang dipasarkan dapat memiliki kualitas jual yang tinggi. Selain itu sarana pemasaran produk-produk yang ada perlu juga dilakukan pembaharuan tujuannya agar masyarakat yang ada di daerah maupun di luar dapat mengetahui produk-produk yang ada di Kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir). Wirausaha pun dapat mendayagunakan segala sumber yang dimiliki

dengan proses yang kreatif dan inovatif sehingga dapat menjadikan UMKM siap menghadapi tantangan krisis global.

Hal ini meliputi beberapa hal diantaranya selalu berpikir secara visionaris, artinya selalu melihat jauh ke depan sehingga memiliki perencanaan yang tidak saja jangka pendek namun juga bersifat jangka panjang. Belajar dari pengalaman orang lain juga dapat menerima kritik serta saran untuk masukan pengembangan UMKM menjadi hal yang sangat penting untuk pengembangan usaha. Selain itu bertindak inovatif menjadi hal penting bagi seorang pengusaha karena dengan bertindak secara inovatif maka membuat pelaku dapat selalu berusaha meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam setiap aspek kegiatan usaha, meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi persaingan bisnis, berani mengambil resiko, dan menyesuaikan profil resiko serta mengetahui resiko dan manfaat dari suatu bisnis.

Tabel 4 : Data UMKM Perkecamatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun 2017

No	Nama Kecamatan	Jumlah
1.	Penukal Utara	184
2.	Penukal	158
3.	Talang Ubi	2283
4.	Tanah Abang	337
5.	Abab	33
	Total	2995

Sumber: Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten PALI (PALI)

Melihat cukup banyaknya pengusaha UMKM pada tabel 4 pada sektor jasa, petani, peternakan, maupun perdagangan maka dapat di pastikan bahwa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dapat menjadi salah satu garda bagi Provinsi Sumatera Selatan. Apabila potensi pada usaha-usaha yang ada di atas dikembangkan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah khususnya oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) maka sangat bermanfaat besar bagi pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan perekonomian masyarakatnya.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengatur permasalahan-permasalahan produk dalam mengatasi persaingan global khususnya kesiapan produk-produk yang akan dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Sehingga sangat diharapkan oleh masyarakat untuk bisa melakukan pendataan, manajemen, pelatihan, pemberdayaan, promosi, pelayanan, kualitas, dan pengawasan yang sesuai agar masyarakat PALI mampu bersaing. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DisKop UKM) harusnya dapat senantiasa memenuhi kebutuhan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ada beberapa masalah dalam implementasi program pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yaitu :

- 1 struktur organisasi yang belum berjalan dengan efektif karena kurangnya intensitas pihak dinas dengan pengusaha.
- 2 terjadinya tumpang tindih tugas antar pegawai pada saat pelaksanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan.
- 3 anggaran yang belum terealisasi penuh sehingga menyebabkan kurangnya kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM.
- 4 Intensitas dan jangka waktu yang terlalu singkat karena hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun dan hanya dilakukan dalam satu hari dengan jangka waktu 3 sampai dengan 4 jam.
- 5 tidak adanya peraturan yang mengatur pasti mengenai kegiatan pelatihan kewirausahaan.
- 6 kurangnya sarana informasi bagi pengusaha untuk mengetahui apa saja yang terjadi di Dinas Koperasi dan UKM maupun pada saat kegiatan pelatihan kewirausahaan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, Pada pasal 4 mengenai fasilitasi pengembangan usaha yang di dalamnya terdapat dua point yang berbunyi :

1. Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya, serta desain dan teknologi.

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian maka penulis membatasi dan hanya meneliti fasilitasi pengembangan SDM yang terdapat pada ayat ke 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Adapun bentuk kegiatan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia yakni berupa pelatihan kewirausahaan oleh Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sehingga penulis menuangkannya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Pengembangan UMKM di Kabupaten PALI Tahun 2017.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dilakukan maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pengembangan UMKM di Kabupaten PALI Tahun 2017 dalam bidang pengembangan SDM di Kabupaten PALI?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diurai diatas maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pengembangan UMKM di Kabupaten PALI Tahun 2017.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menambah pengetahuan dalam bidang Ilmu Administrasi Negara, yaitu pada bidang Kebijakan Publik, khususnya mengenai Implementasi Kebijakan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terhadap bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pengembangan UMKM di Kabupaten PALI Tahun 2017 pada bidang pengembangan SDM.

### 2. Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai kebijakan publik khususnya dalam bidang pemasaran pengembangan pada UMKM dan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan.



- b. Bagi Peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam terjun langsung ke lapangan dalam penelitian yang dapat dijadikan bekal untuk mengembangkan kemampuan menjadi guru profesional.
- c. Bagi Masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama dalam bentuk saran kepada pemerintah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dalam penataan dan pengembangan UMKM.

## DAFTAR PUSATAKA

### Buku

- Budiman, Nashir, 1991. Charles O. *Jones Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: CV.Rajawali
- Muryati, 2003. *Peran Usaha Kecil dan Menengah Di Era Reformasi*, Jurnal IPS dan Pengajarannya, 37, Nomor 3, November 2003.
- Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (2007:130 sd 131), *Manajemen Pemberdayaan (sebuah pengantar dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat)*
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha,Miftah, 2014. *Ilmu Administrasi Public Kotemporer*.Jakarta: Kencana
- Sugiyono.2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan Rd, Bandung*: Alfabeta
- Tambunan, Tulus T.H. 2009. *UMKM di indonesia*. Bogor: Ghalia indonesia.

### Dokumen

- Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten PALI Nomor 129 /Kpts/Dinkop.UKM/2018 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2018
- Perda No 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab PALI (PALI)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat*
- Peraturan Bupati PALI Nomor 051 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten PALI

**Sumber Lain**

<http://pengertianbahasa.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-produksi.html>

<http://jurnalapapun.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-produksi-menurut-para-ahli.html>

Sri Wahyuni R. 2013. *Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sidrap (Studi Kasus : Pemberdayaan Koperasi Pertanian)*. Skripsi. Kabupaten Sidrab : Program Sarjana Ilmu Administrasi.

Pradytia Herlyansah. 2016. *Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Tangerang*. Skripsi. Serang : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.